



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9245-9255

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun: Refleksi Menyambut Pilkada 2024

Yolanda Fifiana Dwi Mukti^{1✉}, Zaenal Muttaqin²

UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: yolandafifiana@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis relevansi pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia. Dalam sejarah pemikiran politik Islam, kedua pemikir ini memberikan sumbangan signifikan dalam menafsirkan hubungan antara moralitas dan kekuasaan. Ibnu Taimiyah mengedepankan pentingnya legitimasi kekuasaan yang berlandaskan pada hukum syariah dan tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat, sementara Ibnu Khaldun menekankan pentingnya stabilitas politik dan kemajuan peradaban melalui siklus politik yang didasarkan pada solidaritas sosial ('asabiyyah). Studi ini mengkaji bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam sistem demokrasi modern, khususnya dalam konteks Pilkada di Indonesia, di mana isu-isu etika politik, integritas pemimpin, dan stabilitas politik menjadi sangat relevan. Melalui metode kajian literatur dan refleksi filosofis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya diskusi etika politik dalam pemilu demokratis, sekaligus memberikan landasan normatif bagi masyarakat dan pemimpin politik dalam menghadapi Pilkada 2024.

Kata Kunci: *Etika Politik, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Pilkada*

Abstract

This study analyzes the relevance of the political ethics of Ibn Taimiyah and Ibn Khaldun in the context of the 2024 Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia. In the history of Islamic political thought, these two thinkers have made significant contributions in interpreting the relationship between morality and power. Ibn Taimiyah emphasized the importance of legitimacy of power based on sharia law and the responsibility of leaders towards the welfare of the people, while Ibn Khaldun emphasized the importance of political stability and the advancement of civilization through a political cycle based on social solidarity ('asabiyyah). This study examines how these values can be applied in a modern democratic system, especially in the context of the Pilkada in Indonesia, where issues of political ethics, leader integrity, and political stability become very relevant. Through the method of literature review and philosophical reflection, this study aims to enrich the discussion of political ethics in democratic elections, while providing a normative basis for society and political leaders in facing the 2024 Pilkada.

Keywords: Political Ethics, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, Pilkada

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia akan menjadi salah satu peristiwa politik yang penting yang dapat mempengaruhi arah pemerintahan dan stabilitas demokrasi di tingkat lokal (Widodo, 2015). Dalam konteks ini, isu-isu terkait etika politik, integritas pemimpin, serta hubungan antara kekuasaan dan kesejahteraan rakyat menjadi semakin krusial, seringkali, dinamika politik demokrasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pemilihan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai etika yang mendasari tindakan para aktor politik (Handoyo dkk., 2016). Menghadapi kenyataan ini, pemikiran politik klasik dari dunia Islam, seperti yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun menawarkan perspektif yang relevan untuk memahami dan menilai praktik politik modern.

Dalam konteks ini, pemikiran etika politik dari dua tokoh besar dalam tradisi Islam Ibnu Taimiyah (1263 – 1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1406), menawarkan perspektif yang relevan dan mendalam. Keduanya, melalui karya-karya filosofis dan sosial politik mereka, memberikan landasan bagi konsep etika kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab.

Ibnu Taimiyah, dalam karyanya *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai inti dari legitimasi kepemimpinan. Ia berpendapat bahwa pemimpin tidak hanya harus mematuhi hukum, tetapi juga bertanggung jawab secara moral untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dipegangnya

digunakan demi kebaikan umat (Zaman, 2019). Pemikiran ini menekankan hubungan yang era tantara etika, hukum dan politik yang relevan dengan konteks demokrasi modern.

Dalam konteks Pilkada 2024, relevansi pemikiran kedua tokoh ini sangat penting untuk direnungkan. Pilkada tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi cermin bagi bagaimana nilai-nilai etika politik diterapkan dalam praktik demokrasi modern. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, solidaritas, dan kesejahteraan bersama, yang menjadi inti dari pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dapat menjadi panduan penting dalam mengatasi tantangan-tantangan politik kontemporer seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi masyarakat.

Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi nilai-nilai etika politik yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dalam konteks Pilkada 2024. Dengan mengkaji secara kritis pemikiran kedua tokoh ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana etika politik Islam klasik dapat diaplikasikan dalam sistem politik demokrasi modern. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan refleksi penting bagi aktor-aktor politik dan masyarakat umum dalam menghadapi tantangan etika dan moral dalam pemilihan pemimpin, serta memberikan kontribusi pada pengembangan wacana tentang etika kepemimpinan yang lebih adil dan bertanggung jawab di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disebut dengan penelitian Pustaka (*library research*) yaitu dengan memanfaatkan secara maksimal bahan-bahan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian (Nasution, 2003). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif. Hal ini bertujuan guna menganalisis secara mendalam dan menggambarkan hubungan antara nilai-nilai etika politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun terhadap relevansinya dalam menyambut Pilkada 2024.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan dengan kanjian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, menegevaluasi, memverifikasi, serta mensistensiskan bukti-bukti guna mengekkan fakta guna memperoleh Kesimpulan yang kuat (Hakim & Budiyo, 2024)

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, antara lain data primer dan data sekunder. Data primer disandarkan pada literatur klasik Siyasa syariyyah Ibnu Taimiah dan Muqddimah Ibnu Khaldun yang secara akademis dipandang otoritatif. Sedangkan data sekunder merupakan sebuah data pendukung yang berasal dari

kepustakaan, buku-buku ataupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan penelitian ini (Sugiyono, 2016).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset Pustaka yaitu proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data informasi diperoleh berdasar pada bahan yang ada di perpustakaan baik berupa arsip, dokumen, majalah maupun lainnya (Hakim & Budiyono, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menguraikan pokok-pokok permasalahan secara menyeluruh dengan membandingkan dan menganalisa data-data yang ada kemudian di kombinasikan guna menghasilkan sebuah pemikiran yang padu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengertian Etika

Etika politik secara Bahasa diambil dari Bahasa Yunani yaitu "*ethos*" yang berarti karakter, kebiasaan, atau adat istiadat. Dalam Bahasa modern, etika merujuk pada cabang filsafat yang membahas tentang baik dan buruk, serta prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia (Bertens, 2000).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna etika memiliki tiga penjelasan. Pertama, etika dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang hal-hal baik dan buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua, etika merujuk pada Kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak. Ketiga, etika diartikan sebagai nilai-nilai tentang benar dan salah yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2016).

Pengertian politik

Kata politik berasal dari Bahasa Yunani "*polis*" yang berarti kota atau negara-kota. Dalam konteks modern, politik merujuk pada seni atau ilmu pemerintahan dan pengaturan hubungan antara individu atau kelompok dalam suatu Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan, dan Keputusan publik. Di sisi lain politik di artikan sebagai rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk merumuskan dan mewujudkan tujuan-tujuan dalam sebuah system yang secara umum mengkaji tentang hubungan kekuasaan

yang meliputi interaksi antara warga negara, hubungan antara warga negara, dan negara, serta hubungan antarnegara (Latif, 2024).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik merupakan pengetahuan ataupun urusan yang berupa tindakan maupun cara menghadapi hal-hal yang berkaitan tentang negara, seperti system pemerintahan dan dasar pemerintahan (Tri Sakti, 2020)

Deliar Noer (Noer, 1983) menyatakan bahwa politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas maupun sikap yang berhubungan dengan kekuasaan guna mempengaruhi dengan jalan mengubah ataupun mempertahankan suatu bentuk susunan Masyarakat .

Etika Politik

Etika politik merupakan cabang filsafat moral yang membahas aspek politik dalam kehidupan manusia, atau lebih spesifiknya, prinsip-prinsip moralitas dalam politik. Sebagai disiplin ilmu dan bagian dari filsafat, etika politik muncul di Yunani ketika struktur-struktur politik tradisional mulai runtuh(Suseno, 2015).

Etika politik adalah kumpulan nilai yang berkaitan dengan moralitas, ilmu yang membahas tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Etika mempelajari bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu atau bagaimana kita seharusnya bersikap secara bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai ajaran moral. Politik, di sisi lain, adalah ilmu yang berhubungan dengan pemerintahan dan kenegaraan, termasuk sistem dan prinsip pemerintahan. Etika politik mengeksplorasi tanggung jawab dan kewajiban manusia, tidak hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai individu yang terikat oleh hukum yang berlaku (Suseno, 2015)

Etika politik berfungsi sebagai pedoman moral dan normatif dalam menilai kualitas struktur serta dinamika politik dengan mengutamakan martabat manusia. Inti dari etika politik terletak pada legitimasi moral kekuasaan. Oleh karena itu, setiap pemegang kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakannya dan jika gagal memenuhi tanggungjawab tersebut kekuasaannya dianggap tidak sah.

Etika Politik Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah

1. Konsep Negara dan Kepemimpinan Negara

Menurut Ibnu Taimiyah, konsep negara di dasarkan pada prinsip bahwa negara adalah instrument untuk menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan umum. Negara harus berfungsi sesuai dengan syariat islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Beliau menekankan pentingnya keadilan sebagai pondasi

pemerintahan yang sah, dan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola negara dengan Amanah dan adil (Zaman, 2019).

2. Pengangkatan Kepala Negara

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jelas mengenai pengangkatan kepala negara. Ia mensyaratkan dua hal yang penting bagi seorang pemimpin, yaitu kekuatan (*al-quwwah*) dan integritas (*al-amanat*). Kekuatan disini merujuk pada kemampuan pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sementara integritas mencakup kejujuran dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik (Zaman, 2019).

3. Negara Nubuwwah dan Khilafah Nubuwwah

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang mendalam mengenai konsep Negara Nubuwwah dan Khilafah Nubuwwah. Ia berargumen bahwa sistem pemerintahan yang ideal adalah yang mengikuti jejak kenabian, yang dikenal sebagai Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah. Konsep ini merujuk pada pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh, dengan menekankan pada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Khan, 2001).

Etika Politik Menurut Pandangan Ibnu Khaldun

1. Konsep 'Ashabiyah

'*Ashabiyah* adalah konsep yang sangat penting dalam pemikiran Ibnu Khaldun, terutama dalam karyanya yang terkenal, *Muqaddimah*. Konsep ini merujuk pada solidaritas sosial atau ikatan kelompok yang menghubungkan individu dalam suatu masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, '*ashabiyah* berperan sebagai fondasi dalam membangun negara dan peradaban (Malik dkk., 2023).

Dalam analisisnya, Ibnu Khaldun mengaitkan '*ashabiyah* dengan siklus kehidupan peradaban. Ia menyatakan bahwa setiap peradaban dimulai dengan kelompok yang memiliki '*ashabiyah* yang kuat, yang kemudian membangun kekuasaan dan pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika '*ashabiyah* mulai melemah, peradaban tersebut akan mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Ini menunjukkan bahwa '*ashabiyah* bukan hanya penting untuk pembentukan, tetapi juga untuk keberlangsungan suatu peradaban.

2. Bentuk Negara menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengemukakan pandangannya tentang bentuk negara dalam konteks sosial dan politik yang sangat terintegrasi. Dalam karyanya, *Muqaddimah*, ia menjelaskan

bahwa negara dapat dibedakan berdasarkan *'ashabiyah* atau solidaritas sosial yang ada di dalamnya (Enan, 2013).

Ibnu Khaldun mengidentifikasi beberapa tipe negara, yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka dibentuk dan dikelola. Ia menekankan bahwa negara yang ideal adalah negara yang didirikan atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, negara yang baik harus mampu menjaga stabilitas sosial dan politik, serta memenuhi kebutuhan rakyatnya.

3. Etik Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang mendalam mengenai etika kepemimpinan, yang tercermin dalam karyanya, *Muqaddimah*. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakter yang baik dan moral yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dengan efektif (Mohamad Iqbal Paudi, 2022).

Menurut Ibnu Khaldun, seorang pemimpin ideal harus memiliki keadilan, kebijaksanaan, dan integritas. Keadilan menjadi landasan utama dalam pemerintahan, di mana pemimpin harus mampu memberikan perlakuan yang sama kepada semua rakyatnya tanpa memandang status sosial. Kebijakan diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis, sedangkan integritas memastikan bahwa pemimpin bertindak sesuai dengan prinsip moral yang tinggi.

Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Terhadap Politik Indonesia

a. Keadilan dan Penegakkan hukum.

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa negara harus menegakkan hukum secara adil. Dalam politik Indonesia, ini mengarah pada pentingnya transparansi, keadilan dan supremasi hukum dalam pemerintahan (Setiadi, 2012). Pemerintah yang transparan berarti terbuka terhadap masyarakat, yang sangat penting untuk mewujudkan *good governance*. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi mengenai tindakan serta kebijakan pemerintah sehingga menciptakan akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Sedangkan keadilan mencakup perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan hukum, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

b. Amanah dan Tanggung jawab pemimpin.

Menurut Ibnu Taimiyah pemimpin haruslah Amanah, yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks politik Indonesia (Julia Sari, 2019), pemimpin haruslah

yang bertanggung jawab dan berintegritas. Tanggung jawab seorang pemimpin mencakup kesadaran akan dampak dari setiap Keputusan yang diambil, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut kepada masyarakat. Pemimpin yang bertanggung jawab akan selalu berusaha untuk melayani kepentingan rakyat dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sedangkan integritas merupakan hal yang penting untuk dimiliki pemimpin. Kepemimpinan berdasarkan kompetensi Ibnu Taimiyah menolak pemimpin yang dipilih berdasarkan keturunan atau status, relevansinya dalam konteks demokrasi di Indonesia adalah memilih pemimpin dengan mengutamakan kemampuan dan visi dari calon pemimpin. Selain itu dalam demokrasi di Indonesia pemimpin dipilih melalui pemilihan sesuai dengan suara rakyat.

c. Melawan Kezaliman

Kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan epemimpinan yang tiran selaras dengan perjuangan politik Indonesia dalam melawan korupsi, kolusi, nepotisme dan otoritarianisme. Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan analisisnya tentang masyarakat dan negara. Pemikirannya, terutama mengenai etika politik, memiliki relevansi yang signifikan terhadap konteks politik Indonesia saat ini.

Refleksi Menyambut Pilkada 2024

Menyambut Pilkada 2024, penting bagi masyarakat untuk melakukan refleksi mendalam dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai etika politik yang digariskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Keduanya menekankan pentingnya pemimpin yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Refleksi ini menjadi lebih penting di tengah dinamika politik modern yang kerap dipengaruhi oleh popularitas, koneksi, atau status sosial, sementara masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun sama-sama sepakat bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan sosial. Etika politik yang mereka anjurkan berfokus pada keadilan sebagai fondasi utama negara, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam konteks Pilkada, hal ini relevan karena masyarakat harus menilai calon pemimpin bukan hanya dari citra atau kampanye

yang mengandalkan popularitas, tetapi dari visi yang jelas, rekam jejak kepemimpinan, dan komitmen untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, anti-korupsi menjadi nilai yang sangat penting. Korupsi adalah ancaman terbesar bagi demokrasi dan pembangunan negara. Ibnu Taimiyah secara tegas mengutuk pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Begitu pula, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ketika pemimpin mengabaikan keadilan dan berlaku tiran, peradaban akan mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran. Dengan demikian, masyarakat harus lebih kritis dalam menilai integritas dan komitmen calon pemimpin terhadap penegakan hukum, transparansi, dan pemberantasan korupsi.

Jika prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun diterapkan, Pilkada 2024 akan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak hanya mampu menghadapi tantangan nasional, tetapi juga memimpin dengan keadilan, moralitas, dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan keadilan seperti yang diajarkan oleh kedua pemikir tersebut harus menjadi landasan dalam memilih pemimpin di masa depan, guna mencapai pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan mengenai relevansi nilai-nilai etika politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dalam konteks Pilkada 2024 menegaskan pentingnya prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum dalam memilih pemimpin. Kedua pemikir menekankan bahwa pemimpin yang ideal harus dipilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan popularitas, status, atau koneksi. Nilai-nilai seperti integritas, penegakan hukum, dan anti-korupsi harus dijadikan standar utama dalam proses Pilkada, karena ini merupakan syarat untuk menghasilkan pemimpin yang transparan, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, Pilkada 2024 menjadi peluang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu menjaga keadilan, stabilitas, dan kemajuan nasional. Pemimpin yang baik harus memiliki visi yang jelas untuk membangun kesejahteraan rakyat, melawan korupsi, dan menegakkan hukum secara adil. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pemimpin yang zalim dan menyimpang dari keadilan akan menghancurkan peradaban, sementara Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kesejahteraan rakyat dan solidaritas sosial ('asabiyyah) sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, M. (2011). Filsafat Etika Islam. Pustaka Setia.
- Bertens, K. (2000). Etika. Gramedia.
- Enan, M. A. (2013). Biografi Ibnu khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia (Cerakan I). Zaman.
- Hakim, A. A., & Budiyo, A. (2024). Pendekatan Historis dalam Memahami Perkembangan Islam di Indonesia: Analisis Sosial dan Keagamaan. 5.
- Handoyo, E., Susanti, M. H., & Munandar, Moh. A. (2016). Etika Politik edisi revisi. Widya Karya. <https://lib.unnes.ac.id/41840/1/Etika%20Politik%20Edisi%20Kedua.pdf>
- Juhaeni, J. (2021). PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Konstituen*, 3(1).
- Julia Sari, I. S. (2019). Hakekat, Dinamika Organisasi, Dan Fungsi Pemimpin Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(1), 26. <https://doi.org/10.30984/jii.v13i1.934>
- Khan, Q. (2001). The Political Thought of Ibn Taymiyya., Terjemahan Anas Wahyuddin, Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah: Vol. Cet. 2. Pustaka.
- Latif, M. A. (2024). PENGERTIAN ETIKA POLITIK SERTA PENDAPAT IBNU TAIMIYAH. *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>
- Magnis-Suseno, F. (2023). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Malik, A., Rahim, A., & Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3599–3610. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>
- Meriam, B. (1982). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia.
- Mohamad Iqbal Paudi. (2022). ETIKA DALAM PANDANGAN IBN KHALDUN. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543, 3(11), 13–20. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss11pp13-20>
- Nasution. (2003). Metode Reasearch (Penelitian Ilmiah). Bumi Aksara.
- Noer, D. (1983). Pengantar ke Pemikiran Politik. Rajawali.
- Saumantri, T., & Abdillah, A. (2020). Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan*

- Kebudayaan Islam, 8(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6326>
- Setiadi, W. (2012). PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suseno, F. M. (2015). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutisna, S., Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Suparoyo, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). *PANORAMA MAQASHID SYARIAH*. CV. Media Sains Indonesia.
- Tim HukumOnline. (2024, Diakses pada Oktober Pukul 05.19 WIB). Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-asas Pemilu. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/), <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai pustaka.
- Tri Sakti, F. (2020). *Pengantar Ilmu Politik*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wahyuningsih, S. (2022). KONSEP ETIKA DALAM ISLAM. 8(1).
- Widodo, W. (2015). PELAKSANAAN PILKADA BERDASARKAN ASAS DEMOKRASI DAN NILAI-NILAI PANCASILA. *CIVIS : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1).
- Zaman, Q. (2019). Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 2(2), 111–129. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1507>.